

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial (Wulandari *et al.*, 2020).

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, kemudian terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Permenkes-2014, 2014).

Tingkat kesejahteraan dari suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh kesehatan masyarakat. Terwujudnya kesehatan masyarakat ditujukan untuk menjamin jaminan sosial kepada setiap warga negara. Masyarakat dapat memperoleh jaminan sosial bahkan pada masyarakat yang hidup di daerah yang tertinggal sekaligus. Pada dasarnya masyarakat yang tertinggal sulit untuk memenuhi tingkat kesehatan karena adanya pembatasan fasilitas maupun pengetahuan oleh pemerintah setempat. Menurut Novya *et al.* (2017) jaminan sosial merupakan komponen yang penting untuk membangun tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah yang tertinggal. Sehingga, pemberian jaminan sosial dapat digunakan menyeluruh diberbagai kalangan dan daerah yang ada dan tersebar di Indonesia.

Penerapan kesehatan yang terkendali dapat dilakukan dengan penggunaan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan dilakukan sistem secara terkendali. Salah satu penerapan dari

adanya jaminan kesehatan sosial yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah satu bentuk dari perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan system yang terkendali (Fathoni dan Kusuma, 2015). Selain dukungan dari pemerintah untuk melakukan jaminan kesehatan, harus juga diimbangi dengan pemahaman kepada masyarakat tentang jaminan kesehatan. Pemahaman dari masyarakat ini dapat dilakukan dengan penyuluhan maupun dengan cara yang dapat menarik rasa simpatik atau perhatian dari masyarakat.

Kota Kediri merupakan salah satu kota tersehat di Indonesia (Shafa, 2015). Namun, pelaksanaan JKN masih banyak keluhan. Masyhary (2015) menyatakan 100.000 dari 293.282 orang di Kota Kediri tidak mendaftarkan JKN dan ada kebiasaan untuk mendaftarkan ketika mereka sakit. (Mahardika, 2016) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis yang telah disajikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri telah terjalin dengan baik. Tetapi ada kendala pada peserta BPJS karena terkadang membutuhkan waktu untuk menjelaskan kepada peserta tentang hak telah mereka peroleh. Kekurangan dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri adalah: Prioritas; Kurangnya informasi; Sistem informasi; Kurangnya informasi antar fasilitas kesehatan.

Dikutip dari LENTERATODAY.COM, Pemerinta Kota Kediri terus melakukan optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang sudah mulai sejak 2018 untuk Universal Health Coverage (UHC) . Saat ini cakupan program JKN masyarakat di Kota Kediri mencapai 96 persen, dari total keseluruhan penduduk kota kediri pada tahun 2020 sebanyak 286.796 orang. Pemkot Kediri juga mengizinkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) dimanfaatkan salah satunya untuk mengasuransikan warganya di BPJS Kesehatan. Pemkot memberikan dana Prodamas senilai Rp100 juta per RT per tahun. Setiap RT di kelurahan manisrenggo sendiri juga mendapatkan bantuan dana Prodamas dari Pemerintah Kota Kediri.

Dari data yang saya dapatkan jumlah masyarakat di Kelurahan Manisrenggo sebanyak 5450 orang, sebanyak 3965 orang merupakan peserta program JKN yang menerima bantuan dana Prodamas dan sisanya sebanyak 1245 merupakan peserta mandiri. Namun, dari keseluruhan

masyarakat di Kelurahan Manisrenggo masih ada 240 orang yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Data tersebut menunjukkan masih ada masyarakat di kelurahan manisrenggo yang belum memanfaatkan program JKN. Pemerintah Kota Kediri sudah memudahkan penduduknya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan bantuan di setiap RT untuk mendata setiaparganya dengan mengumpulkan kartu keluarga. Namun, masih ada juga masyarakat yang mengabaikan hal tersebut.

Faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan BPJS Kesehatan yaitu pengetahuan, sikap dan dukungan keluarga. Dengan melihat pentingnya program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui tentang jaminan sosial yang ada di Indonesia. Selain itu, seluruh masyarakat yang sakit dapat menerima pelayanan kesehatan sebagai peserta JKN meliputi pemeriksaan, perawatan dan pengobatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tingkat keikutsertaan masyarakat sangat berkaitan dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap tingkat perlindungan masyarakat di bidang kesehatan. Oleh karena itu, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program ini dapat mencerminkan keberhasilan program JKN dalam pelaksanaannya.

Masih adanya penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran sehingga masyarakat menganggapnya rumit, minimnya informasi tentang iuran bulanan menyebabkan masyarakat takut bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan, penghasilan yang setiap bulan tidak menentu menyebabkan masyarakat khawatir apabila tidak bisa membayar iuran di bulan tertentu. Kebiasaan masyarakat yang akan mendaftar ketika sedang sakit juga menjadi salah satu faktornya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel tingkat pengetahuan dan sikap. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Kelurahan Manisrenggo terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut bentuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Kelurahan Manisrenggo Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2021”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Kelurahan Manisrenggo Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Manisrenggo Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Untuk mengetahui Sikap Masyarakat Kelurahan Manisrenggo Terhadap Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada seluruh masyarakat melalui BPJS Kesehatan mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

b. Bagi Prodi D3 Asuransi Kesehatan

Penelitian ini diharapkan sebagai media pengembangan wawasan serta pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi media pengembangan wawasan serta pembelajaran dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini sudah didapatkan diperkuliahan.